

## **BAB V**

# **PERAN KERJASAMA BILATERAL INDONESIA DAN TIMOR LESTE DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI TIMOR LESTE**

### **5.1. Hubungan Bilateral Indonesia dan Timor Leste**

Jika dilihat berdasarkan lokasi, Timor Leste berdekatan dengan dua negara yaitu Indonesia dan Australia tetapi diantara kedua negara tersebut Timor Leste lebih dekat dengan Indonesia secara batas karena memiliki batas darat. Timor Leste melakukan kerjasama dengan begitu banyak negara tetapi tetap memilih Indonesia menjadi bagian terpenting di dalam kerjasama bilateralnya terlepas dari permasalahan yang terjadi antara Indonesia dan Timor Leste. Kerjasama bilateral yang terjadi antara Indonesia dan Timor Leste sudah terjadi sejak Timor Leste melepaskan diri dari Indonesia namun banyak permasalahan pasca melepaskan diri dari Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu pertama, permasalahan tentang penyelesaian isu mengenai garis batas negara sehingga dapat diterapkan sistem pas lintas batas yang disepakati oleh kedua negara secara bersama mengingat bahwa lintas batas masuk dalam kategori wilayah sebuah negara. Suatu negara yang merdeka memerlukan wilayah yang pasti secara hukum karena merupakan salah satu syarat terbentuknya suatu negara, kedua, penyampaian komunikasi secara efisien antara pemerintah dan aparat keamanan di kedua belah pihak pada semua tingkatan. Adanya rasa trauma yang besar dari masyarakat Timor Leste akibat konflik saat jajak pendapat yang terjadi antara Indonesia dan Timor Leste menyebabkan Indonesia merasa memiliki kewajiban untuk bekerjasama dengan Timor Leste di dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan dari kedua negara ini dan yang ketiga, meningkatkan kerja sama di berbagai bidang terutama terkait pelatihan dan pertukaran pengetahuan. Mengingat Timor Leste adalah negara yang benar-benar baru dan membutuhkan perkembangan SDM dan SDA yang banyak sehingga menarik perhatian dari Indonesia untuk bisa terlibat di dalam kerjasama bilateral ini<sup>1</sup>.

Adanya kegiatan kunjungan kenegaraan dari masing-masing pihak baik Indonesia dan Timor Leste semakin menunjukkan bahwa kerjasama bilateral yang terjadi antara Indonesia

---

<sup>1</sup><http://setkab.go.id/indonesia-timor-leste-meneguhkan-komitmen-untuk-konsisten/> (diakses pada 28 Februari 2017)

dan Timor Leste semakin baik. Di dalam hubungan internasional, sebuah hubungan kerjasama bilateral yang hanya melibatkan 2 negara saja akan menunjukkan sikap saling membutuhkan dari masing-masing negara tersebut sehingga akan terlihat kepentingan dari Indonesia dan Timor Leste di dalam hal kerjasama bilateral ini. Terkait kepentingan tersebut, peneliti ingin melihat secara lebih mendalam bagaimana kepentingan Indonesia di Timor Leste dengan melihat interval waktu kerjasama bilateral yang terjadi antara Indonesia dan Timor Leste dari tahun 2009-2014 dengan berpedoman pada beberapa perjanjian atau MoU yang sudah disepakati oleh kedua negara ini pada tahun tersebut. Tentunya peneliti juga akan mengaitkan beberapa teori yang sudah dipilih oleh peneliti untuk menganalisis hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Timor Leste di dalam hal ini adalah kerjasama di dalam bidang ekonomi.

## **5.2. Kepentingan Indonesia di Timor-Leste**

Indonesia adalah salah satu negara yang banyak melakukan kerjasama dengan negara-negara luar baik secara bilateral maupun multilateral. Ketika Indonesia melakukan kerjasama pada setiap negara-negara, maka akan dikirimkan masing-masing perwakilan pada setiap negara tersebut. Misalnya Indonesia melakukan kerjasama bilateral dengan Timor Leste sehingga di Timor Leste dikirim badan-badan perwakilan dari Indonesia. Salah satunya adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Dili. KBRI adalah badan perwakilan resmi Pemerintah dan Negara Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler. KBRI berkedudukan di ibukota negara. Dengan demikian, KBRI di Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL) berkedudukan di Dili<sup>2</sup>. Menempatkan badan perwakilan negara di negara lain secara langsung menunjukkan bahwa negara tersebut membutuhkan negara lain dengan demikian hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Timor Leste bisa dirasakan lebih dekat. Seperti yang dikatakan Todaro (1987) di dalam Arief Budiman (2000) tentang ekonomi pembangunan di mana ekonomi pembangunan menekankan peran pemerintah dalam membuat perencanaan ekonomi yang terkoordinir yang didasarkan pada dukungan yang luas baik dari dalam maupun luar negeri. Fungsi penempatan badan perwakilan negara baik itu Kementerian Luar Negeri (KEMENLU) maupun Kedutaan Besar Republik Indoonesia (KBRI) akan mendukung pembangunan ekonomi di Timor Leste.

---

<sup>2</sup><http://portal.kemlu.go.id/dili/Pages/AboutUs.aspx?IDP=1&l=id> (di akses pada 16 April 2016)

Melepaskan diri dari Indonesia tidak membuat Timor-Leste tidak bergantung dengan Indonesia, terbukti dengan impor yang dilakukan oleh Timor-Leste terhadap Indonesia di mana 80% barang-barang di Timor Leste merupakan hasil impor dari Indonesia seperti dari Kupang dan Surabaya sehingga sebagian besar produk yang ada di Timor Leste mirip dengan yang ada di Indonesia. Sebelumnya pada awal restorasi kemerdekaan Timor-Leste atas Indonesia, Australia pernah mencoba untuk menguasai distribusi barang-barang kebutuhan sehari-hari di Timor-Leste namun mengalami kegagalan karena kurang diterima oleh masyarakat Timor-Leste, sehingga Timor-Leste kembali bergantung pada Indonesia pada barang-barang kebutuhan sehari-hari.

**Tabel 5.2**  
**Tahun dan Total Impor Indonesia ke Timor Leste**

No.	Negara Impor	Tahun Impor	Total Impor (US\$)
1	Indonesia	2013	528,823 juta
2	Indonesia	2014	274,7 juta
3	Indonesia	2015	295,460 juta

Sumber : KBRI Dili, Timor Leste, 2016, *diolah*

Dari jumlah impor yang dilakukan oleh Timor Leste terhadap negara lain di dalam hal ini adalah Indonesia dalam 3 tahun terakhir sehingga menghasilkan total perdagangan dan berikut adalah tabel total perdangan luar negeri Timor Leste :

**Tabel 5.2.1**  
**Total Perdagangan Luar Negeri Timor Leste**

No.	Tahun	Total Perdagangan (US\$)
1	2013	581,501 juta
2	2014	795,680 juta
3	2015	311, 161 juta

Sumber : KBRI Dili, Timor Leste, 2016, *diolah*

Dari tabel di atas bisa dilihat total impor terbesar adalah pada tahun 2013 yaitu sebesar 528, 823 juta sedangkan total perdagangan dari Timor Leste sendiri yang mengalami peningkatan sebesar US\$ 795,680 dari tahun 2013 dan mengalami penurunan pada tahun 2015. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan tren impor barang dan jasa dari Timor Leste terhadap Indonesia. Sehingga bisa terlihat dari Tahun 2013 mengalami penurunan yang signifikan pada 2 tahun selanjutnya yaitu 2014 dan 2015. Nilai konsumsi masyarakat Timor Leste mulai menurun terhadap produksi barang dan jasa dari Indonesia.

Ekspor utama Indonesia ke Timor Leste adalah kendaraan bermotor, *cigars*, *palm oil*, peralatan rumah tangga, barang elektronik, bahan makanan dan minuman seperti indomie, air minum kemasan Aqua, alat tulis kantor dan kebutuhan masyarakat sehari-hari lainnya. Selain barang konsumsi adajuga bahan bangunan seperti semen pun diekspor ke sana mengingat Timor Leste sedang melakukan pembangunan sehingga semua kebutuhan pembangunan di impor dari Indonesia dan pelaksanaan proyeknya juga dari Indonesia. Kantor bea cukai terbesar Atapupu yaitu Mota'ain mencatat setiap harinya rata-rata ada delapan dokumen ekspor ke Timor Leste. Delapan dokumen ekspor ini berarti ada sekitar 50 juta ton volume ekspor. Indonesia pun melakukan aktivitas impor dari Timor Leste. Namun barang yang diimpor hanya sebatas pada hasil bumi seperti kopra, kemiri, dan buah asap. Kegiatan impor dari Timor Leste tidak dilakukan setiap hari. Karena menyangkut hasil bumi, maka impor pun dilakukan tergantung masa panen. Di dalam sebulan bisa dua kali atau 3 bulan bisa satu kali<sup>3</sup> sedangkan komoditas ekspor utama dari Timor-Leste sendiri adalah minyak bumi dan gas alam serta hasil pertanian terdiri dari kopi, kemiri, ternak, biji besi dan kayu sehingga tidak mengherankan jika Timor-Leste masih bergantung pada Indonesia meskipun sudah membangun kerjasama dengan negara lain<sup>4</sup>. Investasi Indonesia di Timor Leste adalah sebesar US\$ 100 juta oleh PT Telekomunikasi Indonesia Internasional. Melalui hubungan kerjasama bilateral Indonesia dan Timor Leste maka terjadi kesepakatan antara kedua negara yang kemudian akan disepakati secara bersama dan akan diperpanjang secara otomatis beberapa tahun kemudian. Dan dari perjanjian atau MoU tersebut akan membuat kedua negara ini lebih maksimal di dalam mengembangkan kerjasama kedua negara ini.

Dalam perjalanannya, hubungan antara Indonesia dan Timor Leste menjadi semakin erat, terutama karena Indonesia menjadi salah satu penyokong utama pembangunan ekonomi maupun sumber daya manusia di Timor Leste terbukti dari impor barang dari Indonesia yang

---

<sup>3</sup><http://nasional.kontan.co.id/news/timor-leste-kian-gemar-impor-dari-indonesia> ( diakses pada 22 Maret 2017)

<sup>4</sup>SUMBER: KBRI DILI ( Profil Ekonomi Timor-Leste Update 1 Juni 2016)

semakin meningkat setiap tahunnya. Berbicara tentang kepentingan Indonesia di Timor Leste sebenarnya tidak hanya berbicara tentang bagaimana peran kerjasama Indonesia dan Timor Leste terhadap pembangunan ekonomi yang menjadi fokus pada kerjasama ekonomi, ada beberapa hal yang menjadi kepentingan lain Indonesia di dalam kerjasama ini, yaitu :

#### 5.2.1 Tanggung Jawab Indonesia Pada Masa Lalu Timor Leste

Faktor sejarah masa lalu juga menjadi kepentingan lain dari Indonesia selain peningkatan pembangunan ekonomi bagi Timor Leste. Tanggung jawab yang besar bagi Indonesia untuk memperbaiki citra Indonesia di mata dunia terkait kejadian yang dinilai bahwa Indonesia melanggar hak asasi manusia di Timor Leste sehingga Indonesia terus membangun hubungan yang baik dengan Timor Leste.

#### 5.2.2 Masalah Perbatasan

Saat Timor Leste melepaskan diri dari Indonesia banyak hal yang harus dibenahi salah satunya adalah masalah perbatasan mengingat bahwa Indonesia dan Timor Leste juga berbatasan darat sehingga Indonesia harus mengatur wilayah perbatasan sebagai negara beraulat begitupun dengan Timor Leste, untuk diakui oleh internasional Timor Leste sebagai negara baru yang berdaulat harus memiliki batas wilayah yang sah sehingga pada akhirnya tidak menimbulkan konflik terkait masalah perbatasan. Dengan melihat peluang terbesar di Timor Leste, Indonesia semakin giat untuk membangun kerjasama di segala bidang.

#### 5.2.3 Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Timor Leste

Sejak tahun 2006, Indonesia telah memberikan sekitar 162 program peningkatan kapasitas SDM kepada 1.490 peserta dari Timor-Leste. Pemerintah Indonesia juga memiliki komitmen untuk tetap memberikan bantuan kepada Timor Leste di dalam rangka peningkatan kapasitas negara sebesar US\$ 6.000.000 dalam periode lima tahun (2013-2017) yang diberikan kepada beberapa bidang diantaranya perikanan, *good governance*, pariwisata,



pertanian, infrastruktur, pemberdayaan perempuan dan masyarakat, UKM, mitigasi bencana, pendidikan, dan lainnya<sup>5</sup>.

#### 5.2.4 Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI)

Kepentingan lain dari kerjasama antara Indonesia dan Timor Leste adalah terkait perlindungan WNI (Warga Negara Indonesia) yang ada di Timor Leste. Timor Leste bukan negara yang tertutup sehingga susah untuk dimasuki oleh warga negara lain, justru Timor Leste sudah menjadi negara yang memiliki sistem kewarganegaraan ganda. Berbeda dengan Indonesia yang hanya memiliki satu kewarganegaraan, Timor Leste memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk bisa memiliki status kewarganegaraan lebih dari satu. Indonesia sendiri tetap berpegang teguh untuk menerapkan status kewarganegaraan tunggal. Ketika Timor Leste melepaskan diri dari Indonesia banyak warganegara Timor Leste maupun Indonesia yang kehilangan status kewarganegaraannya sehingga Indonesia memberikan cara agar bisa memperoleh kewarganegaraan di dalam hal ini adalah WNI. Indonesia memberikan aturan bagi seluruh WNI yang ada di Timor Leste apabila telah melepaskan status WNI dan menjadi warga negara Timor-Leste karena mengikuti suami yang orang setempat, maka tidak dapat serta-merta langsung menjadi WNI kembali, meskipunia adalah orang Indonesia asli dan secara hukum seseorang yang bukan lagi WNI harus diperlakukan seperti orang asing. Namun demikian, peraturan hukum di Indonesia masih memberikan peluang untuk memperoleh kembali status WNI dengan persyaratan dan prosedur tertentu<sup>6</sup>.

Terkait dengan kepentingan Indonesia dan Timor Leste, peneliti sempat memberikan beberapa pertanyaan kepada beberapa sumber terkait hubungan kerjasama yang terjalin antara Indonesia yang membuat Indonesia memiliki kepentingan di Timor Leste. Menurut sdri. Zaquelino Pinto salah satu staff lokal di KBRI dili yang bekerja pada bagian fungsi ekonomi melalui wawancara tidak langsung memberikan pendapat terkait hubungan kerja sama yang terjadi antara Indonesia dan Timor-Leste saat ini, sdri. Zaquelino mengatakan bahwa kerjasama antara kedua negara ini semakin meningkat didorong dengan adanya berbagai macam kesepakatan atau *agreement* maupun traktat di berbagai bidang baik di bidang politik, pendidikan, sosial, budaya maupun perdagangan. Hubungan kerja sama yang

---

<sup>5</sup><http://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Seminar-Kerja-Sama-Teknik-Indonesia-JICA-Mengenai-Road-Maintenance-di-Dili,-Timor-Leste.aspx> (diakses pada 02 Maret 2017)

<sup>6</sup>[http://www.kemlu.go.id/dili/id/layanan\\_WNI\\_BHI/Pages/memperoleh\\_kembali\\_kewarganegaraan.aspx](http://www.kemlu.go.id/dili/id/layanan_WNI_BHI/Pages/memperoleh_kembali_kewarganegaraan.aspx) (diakses pada tanggal 02 Maret 2017)

dibina antar negara tentunya satu hal mendasar yang diharapkan bagi kedua negara adalah hubungan kerja sama yang berlandaskan asas saling menguntungkan dan saling menghargai.

Bagi Timor-Leste sendiri hubungan kerja sama bilateral dengan Indonesia sangat menguntungkan bagi Timor-Leste untuk meningkatkan keuangan negara, membantu meningkatkan daya saing ekonomi, meningkatkan investasi, menambah devisa negara serta memperkuat sektor perdagangan. Jika berdiri sebagai warga negara Timor-Leste dan melihat keadaan Timor Leste, Sdri. Zaquelino memiliki harapan agar kedepannya Timor-Leste dapat menjadi negara yang makmur dan mensejahterahkan masyarakatnya. Timor-Leste diharapkan dapat melakukan pembangunan diberbagai sektor untuk melepaskan ketergantungan terhadap migas yang menjadi satu-satunya sumber pendapatan bagi negara. Pembangunan di sektor-sektor produktif seperti pertanian, pariwisata, perikanan dan lain sebagainya diharapkan agar kedepannya Timor-Leste dapat bersaing dengan negara-negara di Asia Tenggara dan melepas ketergantungan terhadap impor, sehingga Timor Leste mulai menggunakan brand produk lokalnya sendiri<sup>7</sup>. Menurut Sdri. Natercia Da Luz yang merupakan salah satu staff lokal juga di KBRI Dili yang bekerja pada fungsi PENSOSBUD mengatakan bahwa hubungan kerjasama bilateral Timor-Leste dan Indonesia selama ini semakin mengalami peningkatan yang baik di berbagai bidang kerjasama. Tentunya peningkatan hubungan ini memberikan manfaat yang baik bagi kedua negara sebagai negara tetangga terdekat. Selain memberikan manfaat bagi negara, juga memberikan keuntungan baik bagi masyarakat kedua negara<sup>8</sup>. Jika Sdri. Natercia berdiri sebagai warga negara Timor Leste dan melihat keadaan Timor Leste saat ini dan berpendapat sebagai masyarakat sipil merasa bahwa memang selama ini Timor Leste menjadi negara baik bagi warga negara meskipun masih terdapat hal-hal tertentu yang perlu dibenahi. Salah satu contoh adalah sebagai negara tentunya Timor-Leste memberikan perhatian bagi kaum miskin dan orang tua lanjut usia (lansia) yang menerima pembayaran uang subsidi. Selain itu, biaya pendidikan dan kesehatan di Timor-Leste yang masih memberikan keringanan biaya.

Kemudian peneliti juga memberikan pertanyaan terkait pekerjaan mereka sebagai *local staff* pada kantor perwakilan Indonesia di Timor Leste yaitu KBRI Dili yang melihat kerjasama yang terjadi antara Indonesia dan Timor Leste apakah Timor Leste sangat bergantung dengan Indonesia dan sebaliknya atau Timor Leste menjadikan partner kerjasama dengan alasan wilayah yang strategis dan Sdri. Zaquelino mengatakan untuk saat ini Timor-

---

<sup>7</sup>Wawancara dilakukan via email pada tanggal 02 Maret 2017 pukul 08.22 WIB

<sup>8</sup> Wawancara dilakukan via email pada tanggal 07 Februari 2017 pukul 14.15 WIB

Leste secara bertahap mulai memperbaiki perekonomiannya dengan melakukan diversifikasi terhadap produk unggulan seperti kopi, cengkeh dan garam yang mulai diekspor ke beberapa negara seperti Amerika, Jepang, Cina, Singapura dan Australia sehingga Indonesia merupakan partner kerjasama bagi Timor-Leste karena selain letak geografis Timor-Leste dan Indonesia memiliki kesamaan adat dan budaya. Sedangkan Sdri. Natercia berpendapat hubungan kerjasama bilateral dan persahabatan Timor-Leste dan Indonesia selama ini semakin mengalami peningkatan yang sangat baik, antara pemerintah maupun antara masyarakat. Sebagai suatu negara, tentunya tidak bisa berdiri sendiri, sehingga tentunya perlu melakukan dan menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara sahabat. Bagi Timor-Leste, selain sebagai negara tetangga terdekat juga Indonesia adalah negara sahabat bagi Timor-Leste, meskipun kedua negara memiliki sejarah masa lalu yang buruk. Namun demikian, dalam berbagai kesempatan kunjungan pejabat kedua negara telah menyampaikan komitmen kedua negara untuk terus meningkatkan hubungan dan kerjasama kedua negara yang lebih baik lagi kedepannya.

Ada juga pendapat yang di berikan oleh narasumber lain yaitu bapak Natalino de Sousa yang di mana beliau merupakan salah satu pegawai pemerintahan yang bekerja pada bidang ekonomi di Timor Leste dan pernah berada di kejadian jajak pendapat antara Timor Leste dan Indonesia yang harus mengungsi ke Indonesia dan kemudian kembali ke Timor Leste dan memilih menjadi warga negara Timor Leste mengatakan bahwa Kerjasama antara Indonesia dan Timor Leste sangat baik dan memang masih ada banyak hal yg perlu dilakukan bersama kedua negara yang tentu nantinya akan sangat menguntungkan kedua belah pihak. Beliau juga menilai Indonesia sangat cocok sebagai mitra kerjasama untuk Timor Leste dan jika berdiri sebagai masyarakat sipil di Timor Leste yang bekerja baik di pemerintahan Timor Leste maupun bekerja di luar intitusi pemerintah Timor Leste melihat keadaan di Timor Leste pada umumnya sudah baik walaupun masih diperlukan waktu untuk memperbaiki keadaan di bidang tertentu seperti misalnya kualitas SDM perlu mendapat perhatian. Masih dibutuhkan investor asing untuk membantu menciptakan lapangan pekerjaan, juga *transfer of skill, knowledge*. Pelan tapi pasti Timor Leste sedang tumbuh di segala bidang dan semua komponen masyarakat bangga dengan negara baru dan kecil ini karena pencapaian kemerdekaan ini telah melewati suatu proses yang sangat panjang dengan pengorbanan jiwa dan raga. Hal itulah yg membuat masyarakat bangga dan senang. Untuk mencapai kesempurnaan tentu perlu waktu tapi itu tidak mustahil jika masyarakatnya sendiri mau sama-sama berusaha dan membangun Timor Leste menjadi lebih baik dan juga di perhitungkan di



dunia internasional<sup>9</sup>. Berdasarkan pendapat dari narasumber-narasumber tersebut, peneliti melihat bahwa kerjasama antara kedua negara ini memang penting untuk dilakukan dan sebagai masyarakat Timor Leste para narasumber ini juga merasa Indonesia sangat cocok untuk dijadikan mitra kerjasama bilateral dengan Timor Leste.

Meskipun Indonesia sudah menjalin hubungan kerjasama bilateral dengan Timor Leste Indonesia menghentikan sejenak kerjasamanya dikarenakan konflik internal yang terjadi di Timor Leste pada tahun 2006 dan setelah itu Indonesia kemudian mulai kembali bekerjasama dengan Indonesia ditandai dengan MoU antara kedua negara pada tahun 2008. Peneliti kemudian tertarik untuk mengambil tahun krusial terkait kerjasama bilateral antara Indonesia dan Timor Leste dan yang menjadi posisi terkuat Indonesia di dalam membantu pembangunan ekonomi di Timor Leste. Kemudian peneliti memilih untuk melihat kerjasama bilateral yang terjadi antara Indonesia dan Timor Leste dari tahun 2009-2014. Ada beberapa alasan peneliti mengambil tahun ini *pertama*, peneliti melihat tahun 2009 ke atas lebih banyak kerjasama dan perjanjian terkait bidang ekonomi yang dilakukan oleh kedua negara ini, *kedua*, peneliti melihat tingkat ketergantungan Timor leste terhadap Indonesia terjadi pada tahun 2009 keatas karena pada tahun-tahun sebelumnya Timor Leste masih mendapatkan bantuan luar negeri untuk memperbaiki dan atau membangun kembali infrastruktur negaranya, *ketiga*, peneliti melihat jumlah impor Timor Leste dari Indonesia diatas tahun 2009 semakin meningkat mengingat bahwa pemenuhan kebutuhan masyarakat Timor Leste banyak berasal dari Indonesia salah satunya adalah bahan pangan meskipun banyak barang-barang dari Australia dan Portugal tetapi Indonesia masih menjadi pilihan utama. Hal inilah yang menarik perhatian peneliti untuk melihat kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Timor Leste dari tahun 2009-2014 terlepas dari kegiatan kerjasama internasional ini yang sudah ada dari tahun 2002.

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste tergolong di dalam kategori kerjasama yang baik dan kokoh dari segala bidang baik itu bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun perlindungan WNI/BHI dan kekonsuleran. Di dalam bidang ekonomi kedua negara ini sama-sama melakukan kerjasama ekonomi yang baik terbukti dari beberapa MoU yang sudah disepakati bersama terkait beberapa bidang kerjasama di dalam ekonomi. Sedangkan pada sosial budaya dan perlindungan WNI/BHI dan kekonsuleran, seperti yang sudah dilakukan Indonesia pada negara-negara lain, Indonesia membantu peningkatan SDM

---

<sup>9</sup>Wawancara di lakukan via whatsapp pada tanggal 02 Maret 2017 pukul 11.07 WIB

dari Timor Leste dengan memberikan bantuan berupa beasiswa dan diklat dan memberlakukan perjanjian bebas visa bagi para pemegang paspor dinas dan diplomatik. Kerjasama lain yang dilakukan oleh Indonesia dan Timor Leste adalah kerjasama teknik. Kerjasama ini sendiri masuk di dalam kerjasama ekonomi. Indonesia sendiri sangat memahami perkembangan yang terjadi di Timor Leste sebagai negara baru yang membutuhkan banyak bantuan terkait dengan pengembangan kapasitas SDM. Ada beberapa program yang ditawarkan oleh Indonesia mulai dari pelatihan, magang, pemberian beasiswa, workshop dan pengiriman tenaga ahli dan program kerjasama ini meliputi pertanian, perikanan, kehutanan, pendidikan, kesehatan, koperasi dan UKM, seni dan budaya, jurnalistik, diplomasi, pertahanan, kepolisian (terkait terorisme dan narkoba) mengingat kejahatan ini sangat terjadi pada wilayah perbatasan, pemerintahan (*good governance*), *risk disaster management* dan *climate change*.

Tahun 2004 sampai oktober 2014 merupakan tahun kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas Indonesia. Setiap kepala negara biasanya memiliki kebijakan politik untuk tetap menstabilkan ekonomi dan politik negaranya. Hal ini juga yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di mana ketika menjabat sebagai Presiden, SBY menggunakan konsep *soft power* di dalam membuat kebijakan diplomasi dalam dunia internasional. Jadi, *soft power* oleh SBY adalah bagian dari kebijakan politik luar negeri Indonesia untuk bisa menarik perhatian negara-negara lain dalam hal ini adalah Timor Leste saat masa pemerintahannya. Pada 26 Agustus 2014 SBY mengunjungi Timor Leste untuk meningkatkan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Timor Leste dan melakukan pertemuan terkait kerjasama bilateral antara dua negara ini yang membahas kerjasama di bidang ekonomi, pendidikan, konektivitas, dan *people to people contact*. Selain itu, juga akan dibahas isu-isu regional dan global yang menjadi perhatian kedua negara. Dan dari hasil pertemuan tersebut juga akan ditandatangani sejumlah Nota Kesepahaman pada bidang perikanan dan kelautan, pendidikan dan kebudayaan, teknologi informasi, serta *Development on Regional Integrated Economic Approach* (DRIEA). SBY juga dijadwalkan meletakkan batu pertama pendirian Gedung Pusat Budaya Indonesia di Dili di mana PBI ini merupakan gedung pusat kebudayaan Indonesia yang nantinya akan membantu Indonesia untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di Timor Leste<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup><http://news.liputan6.com/read/2096318/ri-timor-leste-tanda-tangani-sejumlah-nota-kesepahaman>(diakses pada 11 Maret 2017)

*Soft Power* di dalam hal ini digunakan untuk mendukung kerjasama ekonomi antara Timor Leste dengan Indonesia untuk meningkatkan kapasitas SDM di Timor Leste. Terlepas dari hal tersebut, jika berbicara tentang konsep *soft power* maka kita akan berbicara tentang dunia politik di mana salah satu cara yang dilakukan negara-negara untuk melakukan diplomasi adalah dengan *hard power* atau *soft power*. SBY memilih menggunakan konsep *soft power* di dalam melakukan diplomasi dengan Timor Leste. *Soft power* diplomasi sendiri baru ada di Indonesia dari tahun 2002 yang mana ini merupakan kebijakan atau diplomasi Indonesia yang baru juga meliputi apa yang disebut dengan diplomasi *soft power*. Diplomasi *soft power* ini lahir dan menjadi bagian penting dari pelaksanaan politik luar negeri. Kebijakan *soft power* ini di ambil karena adanya kesadaran akan pentingnya aset nasional yang dapat di jadikan *soft power* Indonesia karena akibat adanya perubahan politik yang terjadi dalam negeri dalam konteks menghadapi perubahan dramatis luar negeri. *Soft power* menurut Joseph S.Nye, Jr adalah “*soft power is the ability to obtain what you want through cooperation and attraction*” (kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan melalui kerjasama dan melalui pemanfaatan kemampuan untuk menarik pihak lain). SBY menerapkan kerjasama bilateral dengan cara diplomasi *soft power* di mana untuk terus menarik perhatian Timor Leste, Indonesia melakukan beberapa program kerjasama kerjasama teknik pada kerjasama ekonomi untuk Timor Leste sejak tahun 2009 dengan tujuan agar SDM di TL terus mengalami perubahan sehingga pembangunan di TL bisa lebih baik.

Program kerjasama teknik yang dilakukan oleh Indonesia dan Timor Leste kemudian menambah kepercayaan Timor Leste atas kehadiran di Indonesia sehingga dari kerjasama tersebut banyak menghasilkan kesepakatan atau perjanjian yang nantinya akan menguatkan hubungan kerjasama bilateral di antara kedua negara ini di dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Timor Leste dan dari perjanjian-perjanjian tersebut akan semakin meningkatkan rasa percaya di antara kedua negara ini untuk tetap saling mendukung kerjasama bilateral yang terjalin antara Indonesia dan Timor Leste.

### **5.3. Perjanjian-Perjanjian Yang Disepakati Oleh Indonesia dan Timor Leste**

Pada sebuah hubungan kerjasama baik itu bilateral, multilateral atau kerjasama lainnya dibutuhkan kesepakatan atau perjanjian diantara pihak-pihak yang melakukan kerjasama. Kesepakatan atau MoU ini nantinya akan menjadi patokan kerjasama negara-negara untuk tetap berada di jalur yang sesuai dengan apa yang sudah disepakati secara bersama.

Indonesia dan Timor Leste juga melakukan kesepakatan atau MoU untuk bisa menjalankan kerjasama bilateral dengan lebih baik karena kedua negara ini juga menjunjung tinggi nilai sebuah kesepakatan yang nantinya akan menentukan arah kebijakan masing-masing negara terkait kerjasama yang dilakukan.

Adapun beberapa perjanjian atau MoU yang sudah disepakati oleh kedua negara ini sejak Timor-Leste merestorasi kemerdekaannya atas Indonesia terkait ekonomi, yaitu :

**Tabel 5.3**  
**MoU antara Indonesia dan Timor Leste Pada Bidang Ekonomi**  
**Tahun 2002 dan 2010-2014**

No.	Negara Mitra	Judul Perjanjian	Tempat dan Tanggal Perjanjian	Status Pengesahan	Status Pemberlakuan
1.	Timor Leste	Memorandum saling pengertian antara pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Timur mengenai Pembentukan Komisi Bersama Untuk Kerjasama Bilateral <i>Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of East Timor on the Establishment of a Joint Commission for Bilateral Cooperation</i>	Jakarta, 02-Jul-2002	<b><u>Ratifikasi</u></b> <b><u>Tidak</u></b> <b><u>Diperlukan</u></b>	<b><u>Mulai Berlaku</u></b> 02-Juli-2002 Tanggal Penandatanganan  <b><u>Masa Berlaku</u></b> 3 tahun dan dapat diperpanjang otomatis setiap 3 tahun berikutnya  <b><u>Cara Pengakhiran</u></b> Dapat dilakukan melalui Pemberitahuan tertulis 6 bulan sebelum masa berlaku berakhir  <b><u>Catatan Khusus</u></b>  - Surat tertanggal 11 Februari 2010 dari Menlu Timor Leste mengenai usulan perpanjangan masa berlaku MoU  - Surat tertanggal 6 Mei 2010 dari Menlu

					Indonesia mengenai Perpanjangan masa berlaku MoU untuk periode 3 tahun berikutnya terhitung sejak 6 Mei 2010
2.	Timor Leste	<p>Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan Kementerian Ekonomi dan Pembangunan Republik Demokratik Timor Leste mengenai Kerjasama Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</p> <p><i>Memorandum of Understanding between the Ministry for Cooperatives, Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia and the Ministry of Economic and Development of the Democratic Republic of Timor-Leste concerning Cooperative, Small and Medium Enterprises Development Cooperation</i></p>	Jakarta, 27-Jan-2010	<p><b><u>Ratifikasi</u></b></p> <p><b><u>Tidak</u></b></p> <p><b><u>Diperlukan</u></b></p>	<p><b><u>Mulai Berlaku</u></b></p> <p>27-Januari-2010</p> <p>Tanggal Penandatanganan</p> <p><b><u>Masa Berlaku</u></b></p> <p>5 tahun dan dapat diperpanjang otomatis setiap 5 tahun berikutnya</p> <p><b><u>Cara Pengakhiran</u></b></p> <p>Dapat dilakukan melalui Pemberitahuan tertulis 6 bulan sebelum masa berlaku berakhir</p>
3.	Timor Leste	<p>Persetujuan Hubungan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Timur</p> <p><i>Air Transport Agreement between the Government of</i></p>	Dili, 27-Jul-2010	<p><b><u>Ratifikasi</u></b></p> <p><b><u>Tidak</u></b></p> <p><b><u>Diperlukan</u></b></p>	<p><b><u>Mulai Berlaku</u></b></p> <p>2 bulan setelah pertukaran Nota Pemberitahuan</p> <p><b><u>Masa Berlaku</u></b></p> <p>Tidak terbatas</p>



		<i>the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste</i>			<p><b><u>Cara Pengakhiran</u></b></p> <p>Dapat dilakukan kapan saja melalui Pemberitahuan tertulis oleh para Pihak</p>
4.	Timor Leste	<p>Protokol Tambahan pada Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Timur mengenai Pembentukan Komisi Bersama untuk Kerjasama Bilateral</p> <p><i>Protocol to Amend the Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste on the Establishment of a Joint Commission for Bilateral Cooperation</i></p>	New York, 22-Sep-2010	<p><b><u>Ratifikasi</u></b></p> <p><b><u>Tidak Diperlukan</u></b></p>	<p><b><u>Mulai Berlaku</u></b></p> <p>22-September-2010</p> <p>Tanggal Penandatanganan</p> <p><b><u>Masa Berlaku</u></b></p> <p>Tidak tercantum dalam Naskah</p> <p><b><u>Cara Pengakhiran</u></b></p> <p>Tidak tercantum dalam Naskah</p>
5.	Timor Leste	<p>Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Infrastruktur Republik Demokratik Timor Leste mengenai Kerjasama di</p>	Jakarta, 22-Mar-2011	<p><b><u>Ratifikasi</u></b></p> <p><b><u>Tidak Diperlukan</u></b></p>	<p><b><u>Mulai Berlaku</u></b></p> <p>22-Maret-2011</p> <p>Tanggal Penandatanganan</p> <p><b><u>Masa Berlaku</u></b></p> <p>3 tahun dan dapat diperpanjang otomatis</p>

		bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum <i>Memorandum of Understanding between the Ministry of Public Works of the Republic of Indonesia and the Ministry of Infrastructures of the Democratic Republic of Timor Leste concerning Cooperation on Public Works Infrastructure</i>			setiap 3 tahun berikutnya  <b><u>Cara Pengakhiran</u></b> Dapat dilakukan melalui Pemberitahuan tertulis 3 bulan sebelum masa berlaku berakhir
6.	Timor Leste	Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Kementerian Infrastruktur Republik Demokratik Timor Leste mengenai Pendidikan dan Pelatihan di bidang Transportasi <i>Memorandum of Understanding between the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia and the Ministry of Infrastructures of the Democratic Republic of Timor Leste concerning Education and Training in the field of Transportation</i>	Jakarta, 22-Mar- 2011	<b><u>Ratifikasi</u></b> <b><u>Tidak</u></b> <b><u>Diperlukan</u></b>	<b><u>Mulai Berlaku</u></b> 22-Maret-2011 Tanggal Penandatanganan  <b><u>Masa Berlaku</u></b> 5 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para Pihak  <b><u>Cara Pengakhiran</u></b> Dapat dilakukan melalui Pemberitahuan tertulis 3 bulan sebelum masa berlaku berakhir
7.	Timor Leste	Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Pariwisata,	Jakarta, 22-Mar- 2011	<b><u>Ratifikasi</u></b> <b><u>Tidak</u></b> <b><u>Diperlukan</u></b>	<b><u>Mulai Berlaku</u></b> 22-Maret-2011 Tanggal Penandatanganan

		Perdagangan dan Perindustrian Republik Demokratik Timor Leste tentang Kerjasama Teknik dalam Perdagangan <i>Memorandum of Understanding between the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia and the Ministry of Tourism, Commerce and Industry of the Democratic Republic of Timor Leste on Technical Cooperation on Trade</i>			<b><u>Masa Berlaku</u></b>  3 tahun, cara pengakhiran tidak tercantum dalam naskah
8.	Timor Leste	Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan Kementerian Ekonomi dan Pembangunan Republik Demokratik Timor Leste tentang Kerjasama di Bidang Lingkungan Hidup <i>Memorandum of Understanding between the Ministry of Environment of the Republic of Indonesia and the Ministry of Economy and Development of Democratic Republic of Timor Leste on Environmental Cooperation</i>	Jakarta, 24-Mei-2011	<b><u>Ratifikasi</u></b> <b><u>Tidak</u></b> <b><u>Diperlukan</u></b>	<b><u>Mulai Berlaku</u></b> 24-Mei-2011 Tanggal Penandatanganan  <b><u>Masa Berlaku</u></b> 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para Pihak  <b><u>Cara Pengakhiran</u></b> Dapat dilakukan dengan cara pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak 6 (enam) bulan sebelumnya
9.	Timor-Leste	Memorandum Saling Pengertian antara Badan Pengawasan Keuangan dan	Jakarta, 25-Mei-2011	<b><u>Ratifikasi</u></b> <b><u>Tidak</u></b> <b><u>Diperlukan</u></b>	<b><u>Mulai Berlaku</u></b> 25-Mei-2011 Tanggal Penandatanganan

		Pembangunan Republik Indonesia dan Kementerian Ekonomi dan Pembangunan Republik Timor Leste tentang Kerjasama Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pengawasan <i>Memorandum of Understanding between the Financial and Development Supervisory Board (BPKP) of the Republic of Indonesia and the Ministry of Economy and Development of the Democratic Republic of Timor Leste concerning Cooperation on Institutional Capacity Building and Human Resources Development for Controller</i>			<p><b><u>Masa Berlaku</u></b></p> <p>5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang otomatis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya</p> <p><b><u>Cara Pengakhiran</u></b></p> <p>Dapat dilakukan dengan cara pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak 6 (enam) bulan sebelumnya</p>
10.	Timor Leste	Pernyataan Kehendak antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste mengenai Pengembangan Pendekatan Ekonomi Regional Terpadu <i>Letter of Intent between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the</i>	Dili, 29- Mei-2012	<p><b><u>Ratifikasi</u></b></p> <p><b><u>Tidak</u></b></p> <p><b><u>Diperlukan</u></b></p>	<p><b><u>Mulai Berlaku</u></b></p> <p>19-Mei-2012 Tanggal Penandatanganan</p> <p><b><u>Masa Berlaku</u></b></p> <p>Tidak tercantum dalam Naskah</p> <p><b><u>Cara Pengakhiran</u></b></p> <p>Tidak tercantum dalam Naskah</p>

		<i>Democratic Republic of Timor-Leste on the Development of A Regional Integrated Economic Approach</i>			
11.	Timor Leste	Memorandum Saling Pengertian antara Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia dengan Kementerian Perdagangan, Industri, dan Lingkungan Hidup Republik Demokratik Timor-Leste tentang Kerjasama Teknis bidang Standardisasi <i>Memorandum of Understanding between the National Standardization Agency of the Republic of Indonesia and the Ministry of Commerce, Industry, and Environment of the Democratic Republic of Timor-Leste on the field of Standardization Technical Cooperation</i>	Jakarta, 15-Agu-2014	<b><u>Ratifikasi</u></b> <b><u>Tidak</u></b> <b><u>Diperlukan</u></b>	<b><u>Mulai Berlaku</u></b> 15-Agustus-2014 Tanggal Penandatanganan  <b><u>Masa Berlaku</u></b> 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk satu kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya dengan kesepakatan Para Pihak melalui jalur diplomatik  <b><u>Cara Pengakhiran</u></b> Salah satu Pihak memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya keinginan untuk mengakhiri MoU ini sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran dimaksud
12.	Timor Leste	Memorandum Saling Pengertian antara Badan Pusat Statistik Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan, Industri, dan Lingkungan Hidup Republik Demokratik Timor Leste tentang Kerja Sama Teknis Statistik Perdagangan, Industri, dan	Jakarta, 21-Nov-2014	<b><u>Ratifikasi</u></b> <b><u>Tidak</u></b> <b><u>Diperlukan</u></b>	<b><u>Mulai Berlaku</u></b> 21-November-2014 (Tanggal Penandatanganan)  <b><u>Masa Berlaku</u></b> 3 (tiga) tahun  <b><u>Cara Pengakhiran</u></b> Salah satu Pihak dapat mengakhiri MoU ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Pihak



		Lingkungan Hidup <i>Memorandum of Understanding between the BPS-Statistics Indonesia of the Republic of Indonesia and the Ministry of Commerce, Industry, and Environment of the Democratic Republic of Timor Leste concerning Technical Cooperation on Commerce, Industry, and Environment Statistics</i>			lainnya. Pengakhiran tersebut akan mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan
--	--	---	--	--	---

Sumber: [http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index?Treaty\[country\\_id\]=11&Treaty\[work\\_type\\_id\]=1&l=id](http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index?Treaty[country_id]=11&Treaty[work_type_id]=1&l=id)

Berdasarkan tabel di atas yang merupakan MoU yang sudah dilakukan oleh 2 negara kemudian peneliti menjelaskan implikasi dari MoU tersebut sebagai berikut :

1. MoU antara Indonesia dan Timor Leste untuk kerjasama bilateral yang disepakati oleh kedua negara ini pada tahun 2002 merupakan langkah awal dari kerjasama bilateral Indonesia dan Timor Leste setelah Timor Leste memilih untuk melepaskan diri dari Indonesia dan menjadi negara baru yang merdeka dan berdaulat. Hasil dari kesepakatan ini kemudian menjadi pondasi awal dari hubungan bilateral yang semakin dipererat dengan kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan *capacity building* salah satunya adalah bidang ekonomi. Masa berlaku dari MoU ini sendiri adalah 3 tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis setiap 3 tahun berikutnya. Timor Leste merasa Indonesia menjadi mitra kerjasama antar negara yang pas sehingga pada tanggal 11 Februari 2010 kementerian luar negeri Timor Leste mengeluarkan surat usulan perpanjangan masa berlaku MoU yang kemudian disepakati oleh kementerian luar negeri Indonesia melalui surat pada tanggal 6 Mei 2010 dan terhitung sejak dikeluarkannya surat tersebut. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara importir terbesar bagi Timor Leste. Setelah kesepakatan ini dilakukan, kesepakatan lainnya kemudian dibuat untuk menunjukkan hasil dari kesepakatan terkait kerjasama bilateral antara Indonesia dan Timor Leste pada bidang-bidang yang sudah disepakati salah satunya adalah ekonomi.

2. MoU antara Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan Kementerian Ekonomi dan Pembangunan Republik Demokratik Timor Leste mengenai Kerjasama Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang di sepakati pada tanggal 27 Januari 2010 di Jakarta mengantarkan kedua negara ini kepada kerjasama bilateral yang berfokus kepada pengembangan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM). Kesepakatan itu bertujuan untuk meningkatkan pengembangan kerjasama ekonomi bilateral antara para pihak berdasarkan persamaan dan saling menguntungkan antar KUKM. Apalagi peran KUKM selama ini sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan ekonomi baik Indonesia maupun Timor Leste<sup>11</sup>. Setelah MoU di sepakati, untuk memperoleh pembelajaran dan pengalaman mengembangkan Koperasi dan UKM, delegasi Kementerian Ekonomi dan Pembangunan RDTL mengunjungi pelaku KUKM dan beberapa lembaga yang berhubungan dengan pengembangan KUKM di Indonesia. Dari hasil kunjungan tersebut Timor Leste kemudian mulai melirik beberapa KUKM untuk dijadikan partner di dalam mengembangkan SDM yang ada di Timor Leste. Salah satunya adalah Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN). Melalui LSM milik Timor Leste yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cailalo menggandeng IKOPIN untuk kerja sama dalam hal pelatihan perkoperasian untuk petani Timor Leste. Kegiatan pelatihan ini dilakukan pada tahun 2010 dengan mengirim 15 petani yang menjadi peserta pelatihan yang akan diberikan pengetahuan mengenai koperasi dan manajemennya. Pelatihan ini diharapkan bisa menghasilkan petani-petani yang memiliki pengetahuan yang baru di dalam mengembangkan pertanian di Timor Leste<sup>12</sup>. Kehadiran koperasi pun masih sangat terbatas. Di Timor Leste sendiri sampai tahun 2012 baru tersedia 4-5 koperasi. Padahal koperasi dinilai akan mendorong kehidupan para petani di Timor Leste karena perekonomian negara akan digerakkan oleh sektor pertanian dan satu-satunya cara melalui koperasi<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup><http://www.antaranews.com/berita/171437/ri-timor-leste-kerja-sama-kembangkan-kukm> (diakses pada 31 Maret 2017)

<sup>12</sup><http://bandung.bisnis.com/read/20101216/3/10230/ikopin-latih-petani-timor-leste-tentang-koperasi> (diakses pada 1 April 2017)

<sup>13</sup><http://www.antarasulsel.com/berita/40356/timor-leste-hadiri-hut-koperasi-ntt> (di akses pada 1 April 2017)

3. MoU terkait persetujuan hubungan udara antara pemerintah RI dan pemerintah Timor Leste disepakati oleh kedua negara ini melalui hubungan bilateral. Mengingat bahwa hubungan udara antara kedua negara ini sangat penting sehingga dengan adanya MoU ini diharapkan bisa membantu meningkatkan ekonomi pembangunan di Timor Leste selain itu juga akses ke Timor Leste ataupun sebaliknya bisa lebih cepat dan mudah. Selain berbatasan darat secara langsung, akses ke Timor Leste juga bisa ditempuh melalui laut dan udara sehingga Indonesia melakukan kerjasama melalui hubungan udara dengan Timor Leste. Sebelumnya penerbangan ke/dari Timor Leste telah dilayani oleh PT. Merpati Nusantara Airlines berdasarkan charter sejak lebih dari 13 tahun yang lalu (sejak tahun 1996-2009). Namun pada karena hubungan bilateral antara kedua negara ini semakin erat sehingga pada tanggal 25 Oktober 2014 PT. Garuda Indonesia Airlines mulai beroperasi di Timor Leste dengan melayani rute Denpasar-Dili-Denpasar kemudian diikuti oleh Sriwijaya Air yang melayani rute penerbangan Denpasar-Dili-Jakarta dan juga NAM Air yang melayani rute penerbangan Denpasar-Dili-Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 2015. Selain PT. Merpati Nusantara Airlines ada juga Batavia Air yang sudah beroperasi di bandara udara Timor Leste dengan rute Denpasar-Dili-Denpasar sejak tanggal 27 Desember 2010. Hasil dari persetujuan hubungan udara antara Indonesia dan Timor Leste kemudian dilanjutkan melalui MoU pada 1 November 2010 yang dilakukan di Jakarta yaitu *Memorandum of Understanding on Air Transport Between Republic of Indonesia and the Democratic Republic of Timor Leste* yang telah ditandatangani oleh Menteri Perhubungan RI dengan Menteri Infrastruktur Timor Leste dan Batavia Air sendiri merupakan salah satu implementasi dari MoU tersebut. Pada perjanjian tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk memberikan hak terbang masing-masing sebanyak 14x/minggu bagi maskapai kedua negara<sup>14</sup>.
4. Protokol tambahan pada MoU antara pemerintah RI dan Timor Leste mengenai pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral ini merupakan sebuah kelanjutan dari MoU yang pertama kali dibuat oleh Indonesia dan Timor Leste pada tahun 2002 tentang kerjasama bilateral di manini merupakan aturan yg membimbing berjalannya sebuah aktifitas diplomasi antar negara yang artinya ini merupakan

---

<sup>14</sup><http://dephub.go.id/post/read/penerbangan-batavia-air-disambut-baik-di-timor-leste-3209> (di akses pada 1 April 2017)

semacam perjanjian untuk mempertegas apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia dan Timor Leste.

5. Pada MoU mengenai kerjasama di bidang infrastruktur pekerjaan umum antara Indonesia dan Timor Leste ini kemudian di implementasikan di Timor Leste. Tercatat selama 2011-2015 lalu, Indonesia membantu pembangunan infrastruktur di Timor Leste berupa jalan, jembatan, bandara, dan gedung-gedung pemerintah dengan nilai investasi mencapai 344,2 juta USD. Proyek tersebut dilaksanakan oleh 11 kontraktor dan dua konsultan dari Indonesia, serta melibatkan tenaga kerja teknis Indonesia sekitar 1.000 orang<sup>15</sup>. Beberapa BUMN yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Timor Leste antara lain PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT PP (Persero) Tbk., dan PT Brantas Abipraya<sup>16</sup>.

Sebagai hasil dari MoU ini adalah sebagai berikut<sup>17</sup>:

**Tabel 5.3.1**  
**Daftar BUMN Indonesia dan Proyek**  
**Yang Dikerjakan Di Timor Leste**

No	Nama BUMN	Proyek yang Dikerjakan	Lokasi	Nilai Investasi (US\$)
1.	PT Wijaya Karya Tbk	1. Pembangunan diesel engine power plant 7x18 MW.	Hera	15 juta
		2. Pembangunan engine power plant.	Betano	22 juta

<sup>15</sup><https://artikel.rumah123.com/indonesia-kerja-sama-bangun-infrastruktur-di-timor-leste-28065> (di akses pada 2 April 2017)

<sup>16</sup><http://properti.kompas.com/read/2015/04/10/134548421/Bantuan.Indonesia.untuk.Infrastruktur.Timor.Leste.Capai.Rp.4.5.Triliun> (di akses pada 2 April 2017)

<sup>17</sup><http://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/2883549/perusahaan-ri-garap-proyek-infrastruktur-rp-44-t-di-timor-leste> ( di akses pada 2 April 2017)

		3. Pembangunan Jembatan Comoro I.	Comoro	9,7 juta
		4. pembangunan Jembatan Comoro II.	Comoro	8 juta
		5. Rehabilitasi jalan nasional 23 Km.	Batugade-Maliana, Bobonara	7 juta
		6. Pembangunan Bandara Oekusi.	Oekusi	75 juta
2.	PT Duta Graha	Jembatan Baer Suai	Suai	6,31 juta
3.	PT Pulau Mas Utama	Markas Militer Komando lama	Dili	3 juta
4.	PT Sasmito	Gedung Menteri Sosial	Dili	3,966 juta
5.	PT Daya Mulia Turangga	Jembatan Dilor Viqueque	Dilor	3,251 juta
6.	PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP)	1. Gedung Menteri Keuangan 2. Pembangunan Jalan Sektor Karimbala 3. Pembangunan Jalan di Tibar-Gleno 4. Pembangunan jalan Liquica	Dili Batugade Gleno Maubara	21 juta 34 juta 29 juta 21 juta
7.	PT Brantas Abipraya	Rehabilitasi irigasi raibere 200 Ha Fase I Rehabilitas irigasi raibere 200 Ha Fase II	Ainaro Ainaro	2,5 juta 1,485 juta
8.	PT Waskita Karya Tbk (WKST)	Pembangunan Bandara Suai	Suai	67 juta



9.	PT Pandaman Putra Utama	Pembangunan Gedung Perdana Menteri	Dili	6 juta
10.	PT Wasisila Indonesia	Hera <i>Powerplant</i>	Dili	6 juta
11.	PT Bimavi	Pembangunan Biara	Dili	3 juta

Sumber : <https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/2883549/perusahaan-ri-garap-proyek-infrastruktur-rp-44-t-di-timor-leste>

6. MoU ini berisi tentang kesepakatan mengenai pendidikan dan pelatihan di bidang transportasi antara Kementerian Perhubungan RI dengan Kementerian Infrastruktur Timor Leste dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas SDM di bidang transportasi. MoU ini juga memuat aturan mengenai hak kekayaan intelektual, kerahasiaan, batasan personel, amandemen, penyelesaian ketidaksesuaian, masa berlaku, jangka waktu, dan pengakhiran. Untuk Kementerian Perhubungan, institusi pelaksana dari MoU ini adalah Badan Pengembangan SDM Perhubungan sedangkan dari Kementerian Infrastruktur Timor Leste adalah *Directorate General of Transport, Equipment, and Communications*<sup>18</sup>. Sebagai wujud dari kesepakatan ini 1 tahun setelah MoU di buat Indonesia kemudian melalui program kerjasamateknik memberikan bantuan dengan mengirimkan 10 orang perwakilan dari Timor Leste melalui kementerian Infrastruktur Timor Leste sebagai instansi penerima bantuan untuk mengikuti *infrastructure in Road Sector South and Triangular Cooperation Between Indonesia, Timor-Leste and JICA, Batch III* (Kerjasama Trilateral, RI-TL-JICA) pada April 2012 yang bertempat di Bandung dan Surabaya, Indonesia dan *Infrastructure in Road Sector South and Triangular Cooperation Between Indonesia, Timor-Leste and JICA, Batch IV* (Kerjasama Trilateral, RI-TL-JICA) pada Juli 2012 di Bandung dan Surabaya sebanyak 9 orang. Dari pelatihan ini di Timor Leste memiliki harapan bagi peserta-peserta asal Timor Leste yang mengikuti kegiatan ini bisa melakukan *transfer knowledge* bagi masyarakat Timor Leste secara umum<sup>19</sup>.

<sup>18</sup> <http://dephub.go.id/post/read/timor-leste-jajaki-kerjasama-dengan-ri-untuk-pendidikan-pelatihan-sdm-transportasi-4160> (di akses pada 2 April 2017)

<sup>19</sup> Sumber : KBRI Dili, *List Program Kerjasama Teknik RI untuk RDTL tahun 2009-2016*

7. MoU ini secara umum berisi tentang kerjasama teknik dalam perdagangan yang disepakati kedua negara yang diwakilkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Pariwisata, Perdagangan dan Perindustrian RDTL. MoU ini nantinya akan menghantarkan Indonesia dan Timor Leste kepada kerjasama yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi aktor lain selain negara juga ikut berpartisipasi di dalam kerjasama teknik ini. Biasanya dari MoU ini juga akan di berikan pelatihan untuk peningkatan SDM. Indonesia akan bekerjasama dengan beberapa instansi atau LSM untuk memberikan pelatihan bagi perwakilan Timor Leste. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kerja sama teknik sektor industri yang termasuk di dalam perdagangan, Kemenperin Indonesia memiliki berbagai unit kerja di bawah koordinasi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) yang kompeten dibidangnya masing-masing dan telah berpengalaman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berskala internasional. Sejak 2011-2016, Kemenperin melalui Balai Besar telah mengimplementasikan sebanyak 15 pembangunan kapasitas di berbagai sektor, antara lain pengolahan makanan, garmen (tekstil), pengelasan, keramik, kerajinan tempurung kelapa, serta magang dalam bidang tenun, alas kaki, dan pengolahan makanan<sup>20</sup>. Sebagai contoh pada tahun 2015 pelatihan kerajinan tempurung kelapa dilakukan di Koror, Palau oleh 2 orang perwakilan dari Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) Yogyakarta, Indonesia. Pelatihan yang diikuti oleh 22 orang peserta lokal ini berprofesi sebagai seniman keramik, pengusaha kerajinan, pemerhati seni kriya, dan guru sekolah. Pelatihan ini di harapkan bisa meningkat SDM di Timor Leste sehingga Timor Leste banyak menghasilkan baran-barang khas Timor Leste yang nantinya akan di ekspor ke negara lain sebagai bentuk dari perdangan Timor Leste<sup>21</sup>. Selain itu juga hampir 80 persen kebutuhan sehari-hari masyarakat Timor Leste terutama pangan berasal dari Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa perdagangan itu penting bagi Timor Leste sehingga Timor Leste berharap dengan adanya MoU ini akan semakin mempermudah dan memperat hubungan perdagangan antara kedua negara yang sama-sama menguntungkan.
8. MoU antara Kementerian Lingkungan Hidup RI dan Kementerian Ekonomi dan Pembangunan RDTL tentang kerjasama di bidang lingkungan hidup ini menjadi bagian

---

<sup>20</sup><http://jambi.tribunnews.com/2016/05/05/indonesia-dan-timor-leste-bikin-kesepakatan> ( di akses pada 2 April 2017)

<sup>21</sup>[www.kemenperin.go.id/artikel/.../Indonesia-Timor-Leste-Perkuat-Kerjasama-Industri](http://www.kemenperin.go.id/artikel/.../Indonesia-Timor-Leste-Perkuat-Kerjasama-Industri)( di akses pada 2 April 2017)

dari kerjasama ekonomi Indonesia dan Timor Leste di dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Timor Leste. Hasil dari MoU ini sendiri adalah sebuah kerjasama yang nantinya akan bergerak di bidang tata ruang, pengelolaan sampah, pengelolaan tanah, perubahan iklim, manajemen bencana, pengembangan regulasi dan penegakan lingkungan. Selain itu juga kerjasama dalam bidang manajemen terpadu zona pesisir dan laut, keanekaragaman hayati dan laboratorium lingkungan. Kerjasama ini dilakukan dengan cara pertukaran ahli teknis, informasi dan praktik terbaik, penelitian dan pelatihan<sup>22</sup>. Implementasinya adalah Pemerintah dan kalangan wirausaha Republik Demokratik Timor Leste sepakat membangun kerjasama dengan Universitas Udayana Bali, Indonesia. MoU dilakukan oleh UNUD dan Timor Leste. MoU bidang lingkungan yang ditandatangani tersebut menyangkut kesiapan Unud untuk memberikan pelatihan bidang lingkungan terkait perubahan iklim (climate change) yang diikuti oleh partisipan dari Timor Leste. Pelatihan akan melibatkan pengajar dan instruktur dari Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Unud dan institusi lingkungan lainnya. Selain itu ada juga kesepakatan yang dilakukan oleh kedua negara untuk menginisiasi penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas negara. 10 DAS lintas negara di perbatasan Indonesia dan Timor Leste, yaitu Talau, Ekad, Babulu, Tafara, Oebase, Besi, Daikain Oepotis, Meto, Mina, dan Kobalima. kompleksitas permasalahan dalam pengelolaan DAS, khususnya DAS lintas negara tidak bisa diselesaikan oleh hanya satu negara yang berada di hulu atau hilir saja melainkan harus bersifat bilateral. Untuk memperoleh keterpaduan pengelolaan DAS yang optimal dibutuhkan persepsi dan komitmen bersama yang tinggi dari dua negara ini baik Indonesia maupun Timor Leste dan seluruh *stakeholders* (yang membidangi Pekerjaan Umum, LHK, Pertanian, Perikanan, Pertambangan, Pemerintahan Dalam Negeri, dan Pemerintahan Daerah). Selain pengelolaan DAS, kedua negara ini juga akan melakukan patroli bersama untuk mengantisipasi terjadinya perdagangan ilegal kayu maupun tumbuhan dan satwa liar<sup>23</sup>.

9. MoU antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia dan Kementerian Ekonomi dan Pembangunan RDTL tentang kerjasama peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang pengawasan terkait keuangan. Badan Pengawasan

---

<sup>22</sup><http://www.antaranews.com/berita/259989/indonesia-dan-timor-leste-kerjasama-bidang-lingkungan> (di akses pada 2 April 2017)

<sup>23</sup><http://www.batasnegeri.com/rencana-pengelolaan-das-lintas-negara-ri-timor-leste/> (di akses pada 2 April 2017)

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia dan Kementerian Ekonomi dan Pembangunan Republik Demokratik Timor Leste merupakan pihak perwakilan dari masing-masing negara. Para Pihak ini bermaksud untuk lebih meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pengawasan pemerintah dari Para Pihak. Mengingat peranan dari peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pengawasan pemerintah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan ekonomi oleh kedua negara ini dan secara lebih spesifik bagi para pihak perwakilan tersebut. Tujuan dari MoU ini sendiri adalah untuk mendorong, mempromosikan dan memberikan kontribusi bagi pembentukan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan SDM di bidang pengawasan pemerintah dari kedua pihak perwakilan tersebut. Sesuai kewenangan yang dimiliki dan sesuai dengan hukum dan peraturan dari para pihak perwakilan, maka para pihak perwakilan tersebut akan mendorong dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kerjasama bilateral dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pengawasan melalui beberapa kegiatan, diantaranya<sup>24</sup> :

1. Pengembangan kapasitas profesional dan kompetensi atas sistem pengendalian intern pemerintah.
2. Penguatan kapasitas organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Ekonomi dan Pembangunan Timor-Leste dalam mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern atas Akuntabilitas Keuangan Negara dalam rangka mendukung pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
3. Membantu satuan kerja Kementerian Ekonomi dan Pembangunan Republik Demokratik Timor-Leste dalam rangka mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
4. Memberikan kesempatan bagi pengembangan aparatur pengawasan untuk berpartisipasi dalam pelatihan non gelar dalam bidang analisis pemecahan masalah, audit forensik, audit Investigatif, audit pengadaan barang dan jasa, pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), manajemen resiko sektor publik dan korporat, *review* laporan keuangan, sistem akuntansi pemerintah pusat, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan sistem Informasi manajemen hasil pengawasan.

---

<sup>24</sup>[http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index?Treaty\[country\\_id\]=11&Treaty\[work\\_type\\_id\]=1&id](http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index?Treaty[country_id]=11&Treaty[work_type_id]=1&id) ( di akses pada 2 April 2017)



5. Menyelenggarakan dan memfasilitasi program pelatihan kerja bagi aparatur pengawasan dalam bidang-bidang tertentu yang berhubungan dengan bidang pengembangan pengawasan atau pengendalian.

6. Melakukan penelitian dan pengembangan bersama di berbagai sektor terkait dengan hal-hal yang akan dikembangkan bersama sebagai bahan untuk perumusan peraturan dan pembuatan kebijakan

10. MoU ini berisi tentang kesepakatan antara Indonesia dan Timor Leste mengenai pernyataan kehendak Indonesia dan RDTL terkait pengembangan pendekatan ekonomi regional. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengembangkan dan melaksanakan program untuk memperkuat konektivitas antara dua negara berdasarkan pendekatan multi-sektoral. Pembangunan dapat dilaksanakan antara lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia dan di Timor Leste dan bila perlu daerah sekitarnya. Dan untuk mempelajari dan mengembangkan pendekatan tersebut, Satuan Tugas Gabungan harus ditetapkan antara kedua pemerintah melalui MoU ini. Satuan Tugas dari kedua pihak ini harus melaporkan tugasnya kepada Sub-Komite Ekonomi. MoU ini juga akan menjadi pondasi utama di dalam menangani permasalahan ekonomi di wilayah perbatasan, misalnya *illegal fishing* yang merugikan kedua negara sehingga Indonesia melalui Kepala Perwakilan FAO Indonesia dan Timor Leste melakukan kerjasama melalui proyek *the Indonesian Seas Large Marine Ecosystem (ISLME)* yang bekerjasama dengan beberapa lembaga mitra di lintas sektor untuk menjawab permasalahan terkait pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan termasuk pengembangan dan penerapan *Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM)* dan *Ecosystem Approach to Aquaculture (EAA)* yang menjadi bagian dari ekonomi regional terpadu<sup>25</sup>.

11. MoU antara Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia dengan Kementerian Perdagangan, Industri, dan Lingkungan Hidup Republik Demokratik Timor-Leste tentang Kerjasama Teknis bidang Standardisasi memiliki tujuan yaitu mendukung peningkatan Kerjasama ekonomi antar kedua negara melalui fasilitasi perdagangan dengan mengeliminasi hambatan teknis perdagangan (TBT) dalam bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. dan bertujuan untuk membentuk kerangka dan mekanisme untuk kerjasama teknis menyangkut standardisasi, penilaian kesesuaian, informasi teknis,

---

<sup>25</sup><https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3382343/kkp-atut-penangkapan-ikan-di-wilayah-indonesia-dan-timor-leste> (di akses pada 02 April 2017)



pelatihan, dan bidang lain yang dimungkinkan dengan persetujuan para pihak perwakilan. Dalam rangka kerjasama di bidang standardisasi, Para Pihak perwakilan dari kedua negara ini akan bekerjasama dalam hal :

1. Pertukaran informasi untuk kepentingan bersama yang mencakup, tapi tidak terbatas pada: a. Produk yang diperdagangkan antara kedua negara, termasuk di dalamnya: daftar produk, standar, regulasi teknis, prosedur penilaian kesesuaian, dan informasi lainnya untuk memfasilitasi perdagangan dari produk-produk tersebut. b. Katalog Standar Nasional dan publikasi penilaian kesesuaian.
  2. Partisipasi pada konferensi, simposium, workshop, pameran dan pertemuan lainnya yang diorganisasi oleh salah satu pihak.
  3. Penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan perjanjian saling pengakuan di bidang penilaian kesesuaian.
  4. Fasilitasi bantuan peningkatan kapasitas teknis di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian kepada salah satu pihak berdasarkan permintaan dengan lingkup bantuan teknis yang disepakati bersama oleh Para Pihak<sup>26</sup>
12. MoU ini berisi kesepakatan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan, Industri, dan Lingkungan Hidup Republik Demokratik Timor Leste tentang Kerja Sama Teknis Statistik Perdagangan, Industri, dan Lingkungan Hidup dengan tujuan bekerjasama terutama pada pembangunan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste dalam bidang statistik untuk perdagangan, industri, lingkungan hidup, dan bidang terkait lainnya. Adapun ruang lingkup kerjasama dari MoU ini adalah Penyediaan data dan informasi statistik melalui kegiatan statistik, perencanaan, pengumpulan, pengolahan, presentasi serta analisis data dan informasi statistik, pemanfaatan data dan informasi statistik, Pengembangan sistem informasi statistik dan pengembangan dan penguatan kemampuan sumber daya manusia bidang statistik<sup>27</sup>.

Berdasarkan tabel diatas bisa dilihat ada beberapa perjanjian atau MoU yang di sepakati oleh Indonesia dan Timor Leste dalam kerjasama ekonomi dan teknik di mana masing-masing MoU tersebut memiliki waktu yang kemudian nantinya akan ditindak lanjuti untuk kepentingan bersama mengingat bahwa sebuah perjanjian internasional menjadi pegangan

<sup>26</sup>[http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index?Treaty\[country\\_id\]=11&Treaty\[work\\_type\\_id\]=1&id](http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index?Treaty[country_id]=11&Treaty[work_type_id]=1&id) ( di akses pada 2 April 2017)

<sup>27</sup>*ibid*

dan kepercayaan yang penting dalam hubungan internasional. Dari MoU tersebut bisa dilihat tahun 2011 menjadi tahun yang paling banyak dilakukan kesepakatan oleh kedua negara ini terkait kerjasama ekonomi. Di dalam perjanjian-perjanjian tersebut juga menyertakan beberapa kesepakatan untuk kerjasama aktor-aktor yang terlibat di dalam hubungan bilateral ini. Aktor-aktor ini tentu memiliki peran yang penting dikarenakan di dalam sebuah hubungan kerjasama tidak hanya negara saja yang terlibat, masyarakat internasional juga bisa terlibat di dalam hubungan kerjasama bilateral ini.

#### **5.4. Aktor-Aktor Yang Berperan Di Dalam Kegiatan Ekonomi di Timor-Leste dan Kebijakan terkait Investasi Asing**

Pada kerjasama suatu negara dengan negara lain pasti ada aktor yang mendukung kerjasama tersebut agar terjalin dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aktor sendiri merujuk kepada pelaku dalam interaksi internasional yang menentukan arah kerjasama nantinya akan seperti apa dan bagaimana kerjasama itu bisa terjalin. Di dalam hubungan internasional sendiri terdapat 2 aktor yaitu aktor negara dan aktor non-negara. Indonesia sebagai aktor negara yang bekerjasama dengan Timor Leste sedangkan terdapat beberapa aktor non-negara yang terlibat dalam kerjasama bilateral Indonesia dan Timor Leste. Tujuan dari para aktor-aktor ini dalam menjalin kerjasama dalam taraf internasional adalah ingin meningkatkan kekuatan dalam artian melalui kerjasama ini, para aktor tersebut bisa menggerakkan orang lain dengan caranya masing-masing.

Pada kerjasama antara Indonesia dan Timor Leste tidak hanya melibatkan satu aktor saja yaitu negara tetapi juga melibatkan aktor non-negara. Sampai saat ini pada bidang investasi terdapat 2 investor asal Indonesia yaitu PT. Pertamina Internasional Timor, SA dan PT. Telkomsel.

##### **1. PT. Pertamina Internasional Timor, SA**

Pertamina merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang energi meliputi minyak, gas serta energi baru dan terbarukan. Pertamina menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik sehingga dapat berdaya saing yang tinggi di dalam era globalisasi.

## 2. PT. Telkomsel

PT. Telkomsel merupakan anak perusahaan dari Telkom International (Telin) yang mulai masuk di Timor Leste sejak September 2012. Kehadiran Telkomcel di Timor Leste memang sudah lama ditunggu oleh masyarakat Timor Leste dengan alasan karena tarif telepon seluler di Timor Leste selama ini terlalu mahal untuk masyarakat setempat, apalagi kalau dibandingkan dengan tarif di Indonesia. PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Telkom) melalui anak perusahaannya PT. Telkom Internasional (Telin) secara resmi datang ke Timor Leste setelah memenangkan tender internasional untuk menangani telekomunikasi nirkabel di Timor Leste. Selama ini, layanan telepon seluler di Timor Leste ditangani perusahaan dari Portugal dan Australia. Hal yang sangat membanggakan bagi Telkomcel karena di hari pertama Telkomsel mengaktifkan jaringannya sudah terdapat 23.000 pelanggan. Keuntungan Telkom Group naik lebih dari satu triliun rupiah pada 2012, menjadi Rp 12,85 triliun atau naik, 17,2% dibanding yang diraih di 2011. Telkomcel sendiri sudah mendapatkan lisensi spektrum radio dari pemerintah Timor Leste pada 22 Oktober 2012 untuk menyediakan layanan seluler di seluruh Distrik di Timor Leste dan jaringan internet 3G. Sampai saat ini, Telkomcel sudah memiliki sekitar 115 base transceiver station (BTS). Telkomcel juga berupaya untuk mendapatkan 600.000 pelanggan di Timor Leste pada 2018, atau 60 persen dari jumlah penduduk di Timor Leste<sup>28</sup>.

Selain kedua investor asal Indonesia terdapat juga BUMN yang beroperasi di Timor Leste dan sampai saat ini sudah tercatat sebanyak 14 BUMN yang ada di Timor Leste, yaitu : PT. Pertamina Internasional Timor, SA, PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, PT. Telkomcel Internasional, PT. Sucofindo, PT. Pembangunan Perumahan (PP), PT. Wijaya Karya (WIKA), PT. Brantas Abipraya, PT. Kimia Farma, PT. Garam Indonesia, PT. Gapura Angkasa, PT. Waskita Karya, PT. Adhi Karya, PT. Citilink Indonesia dan PT. Hutama Karya. Dari 14 BUMN tersebut sebagian besar bergerak pada bidang pengadaan barang proyek, properti, pembangunan infrastruktur baik gedung kantor maupaun jalan, transportasi dan juga perbankan. Bank Mandiri sendiri sudah ada di Timor Leste dari tahun 2002 dan Bank Mandiri merupakan satu-satunya bank asal Indonesia yang berada di Timor Leste. Sebelumnya Bank Rakyat Indonesia juga sudah ada di Timor Leste dari sebelum berpisah dengan Indonesia tetapi karena terjadinya konflik antara Indonesia dan Timor Leste dan

---

<sup>28</sup><http://www.telkom.co.id/en/arief-yahya-telkom-siap-kuasai-timor-leste-2.html> (diakses pada 03 Maret 2017)

menyebabkan kerugian yang besar menyebabkan bank BRI menutup kantornya di Timor Leste, selain itu juga karena Timor Leste sudah bukan menjadi bagian dari Indonesia lagi.

Disaat melakukan investasi asing biasanya ada kebijakan yang diberikan negara untuk investasi tersebut salah satunya adalah pemberian pajak pada masing-masing investasi asing. Kementerian Keuangan Timor-Leste menetapkan beberapa pajak diantaranya, bea masuk (*import duty*) sebesar 2,5%, cukai variatas (10 jenis barang kena cukai) dan pajak penjualan (*sales tax*) sebesar 2,5%. sedangkan terkait barang yang masuk ke Timor-Leste untuk tujuan sementara / temporary dan akan dibawa lagi keluar dari Timor-Leste (tidak untuk dijual di Timor-Leste), masuk dalam kategori *Re-Export*. Untuk barang-barang yang masuk dalam kriteria ini dikenakan jaminan sebesar 3% (dari harga barang) dan dapat diambil kembali ketika barang tersebut dibawa keluar dari Timor-Leste. Jangka waktu barang kategori *Re-Export* hanya diijinkan berada di Timor-Leste paling lama 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali untuk masa 6 (enam) bulan. Lebih dari masa waktu yang ditentukan barang tersebut harus dikeluarkan dari Timor-Leste atau dijual, dan selanjutnya dikenakan pajak penjualan sebesar 5%<sup>29</sup>.

Berikut adalah daftar barang-barang kena cukai di Timor-Leste yang di harapkan dari penetapan pajak ini bisa menambah APBN dari Timor Leste mengingat bahwa impor barang-barang ke Timor Leste tidak hanya dari Indonesia saja tetapi dari beberapa negara seperti Vietnam, Australia dan Portugal.

**Tabel 5.4**  
**Daftar Barang-Barang Kena Cukai Di Timor-Leste**

No	Jenis Barang	Jumlah Bea Cukai Pajak (US\$)	Presentasi Cukai Pajak (%)
1	Beer	1.90/liter	-
2	Wine, Vermouth	2.50/liter	-
3	Minuman Alkohol lainnya	8.90/liter	-
4	BBM	0.06/liter	-
5	Rokok dan produk tembakau lainnya	19/kg	-
6	Pemantik Rokok	-	12
7	Pipa Rokok	-	12
8	Senjata api dan amunisi	-	200
9	Kendaraan bermotor	>70.000,000	35
10	Kapan dan pesawat pribadi	-	20

Sumber : <http://www.kemlu.go.id/dili/id/informasi/Pages/Bea-dan-Cukai.aspx>

<sup>29</sup><http://www.kemlu.go.id/dili/id/informasi/Pages/Bea-dan-Cukai.aspx> (diakses pada 09 Maret 2017)

Bagi Indonesia sendiri Timor Leste memberikan beberapa hak istimewa untuk lebih mempererat kerjasama diantara kedua negara ini. Indonesia dan Timor Leste telah sepakat pada pertemuan kedua kepala Negara untuk meningkatkan kerjasama diantaranya Pendirian Pusat Budaya Indonesia (PBI) di Timor-Leste dan Timor Leste sendiri telah menyatakan untuk menyewakan sebidang tanah sebagai tempat PBI. Penandatanganan Perjanjian Sewa Lahan secara simbolis dilakukan oleh kedua negara yang diwakili oleh masing-masing pihak di mana RDTL diwakili oleh Sekretaris Negara untuk Pertanahan dan Kepemilikan RDTL dan dari pihak Indonesia diwakili oleh Duta Besar LBBP RI di Dili pada tanggal 26 Februari 2014 dan disaksikan Wakil Menteri Luar Negeri dan Kerjasama TL, Sekretaris Negara Seni dan Budaya dan tamu undangan lainnya<sup>30</sup>.

**Gambar 2**  
**Penandatanganan Perjanjian Persewaan Lahan Gedung PBI**



Sumber : <http://www.kemlu.go.id/dili/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Pusat-Budaya-Indonesia-PBI-akan-dibangun-di-Timor-Leste.aspx>

Indonesia berharap dengan adanya PBI ini bisa meningkatkan kerjasama dan berbagi pengetahuan seni budaya dengan negara tetangga mengingat Timor Leste merupakan negara tetangga yang memiliki adat istiadat dan budaya dan bisa berbagi dengan Indonesia dalam hal

<sup>30</sup><http://www.kemlu.go.id/dili/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Pusat-Budaya-Indonesia-PBI-akan-dibangun-di-Timor-Leste.aspx>



ini antar masyarakatnya sehingga sistem *people to people contact* bisa terealisasi dengan baik. Selain itu juga Indonesia berharap dengan adanya Pusat Budaya Indonesia (PBI) bisa lebih fokus untuk *sharing* seni dan budaya Indonesia di mana hal ini bisa diharapkan dapat mengembangkan pendidikan seni dan budaya serta mendukung pariwisata dan pengetahuan dan citra positif Indonesia di dunia internasional<sup>31</sup>. Dengan adanya PBI ini sendiri diharapkan bisa meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan Timor Leste melalui diplomasi *soft power*.

**Gambar 3**  
**Gedung Pusat Budaya Indonesia (PBI) di Dili, Timor Leste**



**Sumber :** <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/2017/02/08/rapat-koordinasi-kelompok-kerja-tindak-lanjut-rekomendasi-komisi-kebenaran-dan-persahabatan-republik-indonesia-timor-leste-pokja-kkp-ri-tl/>

### 5.5. Refleksi Hasil Penelitian

Timor Leste merupakan negara bekas jajahan bangsa Portugis dan setelah merdeka atas bangsa Portugis melalui “Revolusi Bunga” pada tahun 1975 kemudian Indonesia melakukan invansi ke Timor Leste dan menjadikan Timor Leste sebagai provinsi ke-27 dari Indonesia. Setelah melakukan jajak pendapat yang cukup lama dan dibantu oleh PBB akhirnya Timor Leste melepaskan diri dari Indonesia dan resmi menjadi negara sendiri yang memiliki kedaulatan dan kemudian berubah nama menjadi Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) pada Mei 2002.

---

<sup>31</sup>*Ibid*

Adanya sikap saling ketergantungan diantara kedua negara ini ditunjukkan dengan cara kerjasama di beberapa bidang salah satunya adalah ekonomi. Menurut Sukarwarsini Djelantik (2015 : 324) teori ketergantungan diterapkan dengan sejumlah investasi besar untuk memulai jalannya pembangunan ekonomi negara. Hal ini menyebabkan negara tergantung pada bantuan asing untuk pembangunan. Ini jelas dalam teori ketergantungan di mana sejumlah negara yang baru berdiri terus-menerus dibantu oleh negara-negara berkembang, dengan mengorbankan kepentingan negara itu sendiri. Artinya, negara baru di dalam hal ini adalah Timor Leste akan terus bergantung ke negara-negara berkembang di dalam hal ini adalah Indonesia. Alasan dari ketergantungan negara baru kepada negara berkembang dengan mengorbankan kepentingan negara karena ada kepentingan secara umum yang perlu dilakukan oleh Timor Leste yaitu kesejahteraan masyarakat secara umum. Timor Leste terlihat sebagai negara yang bergantung kepada Indonesia, alasan peneliti mengatakan hal ini karena meskipun Timor Leste membangun kerjasama dengan negara lain seperti Australia yang sangat berdekatan dengan Timor Leste juga atau Portugal mungkin juga memiliki kepentingan lain bagi Timor Leste atau negara maju seperti Cina dan Amerika yang sebenarnya jika di lihat Timor Leste sebagai negara baru seharusnya bergantung kepada negara maju dan bukan negara berkembang seperti Indonesia, tetapi Timor Leste masih memilih untuk bergantung kepada Indonesia di dalam meningkatkan pembangunan ekonominya. Indonesia menjadi negara mitra penting bagi Timor-Leste karena dilihat dari letak geografis serta kesamaan budaya. Hubungan antara masyarakat atau *people to people contact* antara Timor-Leste dan Indonesia menjadi dasar hidup bertetangga serta bernegara yang baik, aman dan damai. Ada keuntungan tersendiri bagi Indonesia yang memiliki perbatasan darat langsung dengan Timor Leste. Kekuatan sosial masyarakat memaksa Timor Leste untuk tidak bisa memutuskan hubungan kerjasama bilateralnya dengan Indonesia.

Selain menjadi negara yang saling bergantung, peneliti juga melihat kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara ini lebih terlihat sebagai negara yang memakai konsep diplomasi liberal. Sebuah kerjasama diperlukan diplomasi yang baik. Di dalam hal ini kedua negara sama-sama melakukan diplomasi yang baik. Penempatan perwakilan negara di masing-masing negara merupakan salah satu contoh yang menunjukkan bahwa kerjasama dilakukan dengan cara diplomasi yang lebih damai dan kooperatif. Diplomasi liberal juga sama dengan melakukan negosiasi di antara kedua negara ini dengan mendapatkan *win-win solution* di mana Indonesia dan Timor Leste merasa sama-sama diuntungkan melalui kerjasama bilateral ini. Aktor-aktor non-negara juga menjadi bagian terpenting di dalam

konsep diplomasi liberal ini. Ketertarikan Timor Leste untuk memilih investor asing untuk melakukan penanaman modal asing di Timor Leste merupakan bukti diplomasi liberal yang kuat yang dilakukan oleh negara untuk tetap menarik perhatian Timor Leste.

Konsep Liberalisme juga digunakan peneliti untuk menjadi pisau analisis pada peran kerjasama bilateral yang terjadi antara Indonesia dan Timor Leste terkait pembangunan ekonomi di Timor Leste. Di dalam liberalisme sendiri ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh kaum liberal terkait hubungan internasional salah satunya yaitu liberalisme republikan. Menurut Robert Jackson dan Georg Sorensen (1999) dalam buku yang diterjemahkan oleh Dadan Suryadipura (2005:177) menjelaskan tentang liberalisme republikan di mana negara-negara demokrasi tidak berperang terhadap satu sama lain. Hal itu disebabkan pada budaya domestiknya atas penyelesaian konflik secara damai, pada nilai-nilai moral bersama, pada hubungan kerjasama ekonomi dan interdependensinya yang saling menguntungkan. Dari penjelasan tersebut peneliti melihat bahwa hubungan bilateral yang terjadi antara Indonesia dan Timor Leste memang fokus kepada keuntungan dari kerjasama tersebut dan melupakan kejadian di masa lalu yang di mana sebelumnya memang pernah terjadi konflik antara Indonesia dan Timor Leste sebelum Timor Leste memerdekakan diri yang kedua kalinya atas Indonesia. Sebagai negara demokratik Timor Leste juga memastikan kesejahteraan masyarakatnya. Masyarakat Timor Leste yang masih sangat bergantung kepada impor Indonesia menyebabkan Timor Leste masih tetap meneguhkan diri untuk bekerjasama dengan Indonesia meskipun banyak negara yang sudah melakukan kerjasama bilateral maupun trilateral dengan Timor Leste.

Kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia kepada Timor Leste yang lebih *soft power* menunjukkan bahwa pemikiran liberalisme terhadap kerjasama dunia internasional sekarang ini lebih penting daripada pemikiran realisme. Ketergantungan Timor Leste pada Indonesia tidak menyebabkan Timor Leste harus melakukan konflik untuk memperebutkan batas wilayahnya atau untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara ekonomi dan sosial. Kerjasama yang lebih damai dan kooperatif dipilih oleh dua negara ini untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang terjadi di Timor Leste. Dan hasil dari kerjasama tersebut justru semakin mempererat hubungan bilateral di antara kedua negara ini dan juga sama-sama menguntungkan baik bagi Indonesia maupun bagi Timor Leste.

Dengan melihat pada penelitian terdahulu peneliti lebih fokus kepada konflik yang terjadi antara Indonesia dan Timor Leste sebelum Indonesia melepaskan Timor Leste dan tata

cara penyelesaian konflik yang terjadi di Timor Leste serta kelompok-kelompok yang saat itu berada di Timor Leste yang melakukan pemberontakan terhadap kemerdekaan Timor Leste atas Indonesia sehingga pada pemamparan perbandingan penelitian dengan peneliti terdahulu fokus utama para peneliti terdahulu adalah sebagian besar penyelesaian konflik sedangkan pada penelitian saat ini peneliti juga fokus kepada konflik antara Indonesia dan Timor Leste tetapi hasil akhir dari keadaan setelah konflik tersebut yaitu kesepakatan kerjasama yang terjadi di antara kedua negara ini khususnya pada bidang ekonomi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di Timor Leste.

Relasi damai juga telah ditunjukkan pada masa pemerinthan SBY dengan kegiatan-kegiatan kenegaraan yang lebih fokus kepada pergerakan aktifitas *people to people contact*. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya penelitian ini juga berpedoman kepada masa pemerintahan SBY di mana saat itu *Soft Power* diplomasi digunakan sebagai ujung tombak dari kerjasama bilateral antara Indonesia dan Timor Leste sehingga tingkat kepercayaan Timor Leste ditunjukkan dengan beberapa MoU yang sudah disepakati bersama oleh kedua negara sebagai wujud kerjasama bilateral yang terjalin di antara kedua negara ini.